



MITIGASI BENCANA DAPAT PORSI BESAR Dokumen RPB Sasar Tiap OPD

YOGYA (KR) - Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) bakal diperluas hingga menyasar tiap organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemkot Yogya. Upaya tersebut agar skema penanggulangan bencana menjadi lebih tertata dan terencana dengan baik.

Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Yogya Nur Hidayat, mengungkapkan dokumen RPB sebenarnya harus dimiliki oleh setiap daerah. Hal ini merujuk Peraturan Pemerintah

(PP) Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana.

"Perencanaan penanggulangan bencana merupakan bagian dari perencanaan pembangunan. Sehingga dokumen RPB yang disusun ini akan menyeluruh, terarah dan terpadu di Kota Yogya. Setiap OPD dan stakeholder di pemerintahan wajib memiliki dokumen RPB," urainya di sela-sela seminar penyusunan RPB, Selasa (1/8).

Seminar kemarin melibatkan banyak unsur mulai lembaga swadaya

masyarakat (LSM), perguruan tinggi, dunia usaha serta pemerintahan. Kegiatan tersebut diharapkan bisa menghasilkan model perencanaan penanggulangan bencana yang komprehensif, terkoordinasi, terpadu, terarah dan menyeluruh.

Sekretaris BPBD Kota Yogya Agus Maryanto, menambahkan RPB yang tengah disusun tersebut untuk periode 2023-2028. Di dalamnya menyangkut penanggulangan bencana mulai dari aspek pra bencana, saat bencana dan pasca bencana.

"Tiap aspek tersebut kita buat perencanaan. Itu yang penting. Misal saat pra bencana selama ini daya dukung masih sedikit. Nah, bagaimana ke depan ini bisa lebih dikuatkan dukungan anggarannya," imbuhnya.

Dicontohkannya pada negara maju seperti Jepang, mitigasi atau pra bencana justru mendapat porsi anggaran yang tinggi. Hal itu menjadi investasi dan terbukti jatuhnya korban baik materi maupun jiwa bisa diminimalisir. Dengan begitu, kebutuhan anggaran untuk penanganan saat bencana dan pasca bencana juga semakin efektif. Selama ini di Indonesia, anggaran untuk pra bencana masih minimalis sedangkan anggaran pasca bencana

jauh lebih besar.

Selain itu dalam dokumen RPB juga mempertimbangkan tema-tema kebencanaan sesuai OPD. Seperti halnya di sektor pariwisata perlu ada upaya mitigasi yang lebih spesifik. Selain titik kumpul serta kekuatan bangunan juga tempat parkir yang harus tanggap bencana dengan desain yang tidak berliku. Tempat parkir tanggap bencana akan memudahkan armada bus pariwisata dalam melakukan evakuasi.

"Jadi tinggal lurus saja, tidak perlu harus berbelok. Itu misalnya mitigasi di sektor pariwisata. Begitu juga di OPD lain seperti pendidikan, kesehatan dan lainnya, semua akan masuk dalam dokumen RPB," urainya.

(Dhi)-f

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. BPBD	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 22 Juli 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005